

## NALA

Jurnal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Volume 4, Nomor 2, 2024, hal. 73 - 82

### **PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM PEMBENTUKAN PERILAKU MASYARAKAT YANG TAAT HUKUM**

Rio Saputra, Rommy Hardyansah, Didit Darmawan,  
Hendrianto Udjari, Pratolo Saktiawan  
(Universitas Sunan Giri Surabaya)  
Korespondensi: dr.rommyhardyansah@gmail.com

#### **ABSTRAK**

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah memiliki peranan penting untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum. Pendidikan ini memberikan pemahaman mengenai hak, kewajiban, dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Melalui pembelajaran yang relevan dan berbasis pada contoh nyata, siswa diajarkan untuk memahami peran hukum dalam kehidupan sehari-hari serta menginternalisasi nilai-nilai kedisiplinan dan tanggung jawab. Guru memiliki peran yang signifikan untuk menyampaikan materi dengan cara yang menarik dan aplikatif. Meskipun begitu, tantangan yang dihadapi dalam implementasi pendidikan kewarganegaraan adalah kurangnya perhatian terhadap kualitas pengajaran serta kurikulum yang terbatas. Kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan ini mengajarkan pengetahuan teoritis dan membentuk kebiasaan taat hukum pada siswa. Dengan dukungan yang tepat, pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi faktor kunci untuk membentuk generasi muda yang sadar hukum dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosial mereka.

Kata-kata kunci: pendidikan kewarganegaraan, taat hukum, pembelajaran berbasis kasus, disiplin, karakter, kurikulum, kolaborasi.

## PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah memiliki peran yang sangat vital untuk membentuk karakter dan pola pikir siswa mengenai kewajiban sebagai warga negara. Salah satu hal yang terpenting dalam pendidikan ini adalah pembelajaran mengenai hukum dan bagaimana setiap individu berperan untuk mematuhi hukum yang berlaku. Dengan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, diharapkan dapat terbentuk individu yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi (Carretero *et al.*, 2015). Pembentukan perilaku yang taat hukum dimulai sejak dini, terutama di lingkungan pendidikan, karena generasi muda yang mendapatkan pendidikan yang tepat akan lebih mampu beradaptasi dan menghargai aturan-aturan hukum di kehidupan sehari-hari. Hal ini sangat penting, mengingat perkembangan zaman yang semakin kompleks dan beragam.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, masih banyak ditemukan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat, baik yang berasal dari ketidaktahuan atau kesengajaan. Masyarakat yang tidak memiliki pemahaman mengenai pentingnya hukum sering tidak menghargai atau bahkan mengabaikan hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa ada ketidaksesuaian antara pemahaman hukum yang diajarkan di sekolah dan penerapannya di kehidupan nyata (Pangalila *et al.*, 2020). Pendidikan kewarganegaraan seharusnya berfungsi sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai hukum secara efektif sehingga menjadi pengetahuan akademis semata, dan menjadi bagian dari kebiasaan dan perilaku sehari-hari masyarakat (Campbell, 2019).

Meskipun pendidikan kewarganegaraan sudah diajarkan di sekolah-sekolah, penerapan nilai-nilai yang diajarkan dalam kehidupan sehari-hari sering kurang optimal. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah adanya gap antara teori yang diajarkan di sekolah dan kenyataan sosial di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan yang cenderung teoritis sering tidak mampu memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan hukum dalam kehidupan praktis (Valeeva *et al.*, 2015). Akibatnya, meskipun siswa memahami pentingnya hukum, banyak dari mereka yang tetap menunjukkan perilaku yang tidak taat hukum ketika berada di luar lingkungan pendidikan. Selain itu, meski ada upaya untuk meningkatkan pemahaman hukum di sekolah, penerapan pendidikan kewarganegaraan sering terbatas hanya pada aspek formal tanpa adanya tindak lanjut yang cukup di kehidupan sehari-hari.

Selain itu, kualitas pengajaran pendidikan kewarganegaraan yang masih bervariasi di berbagai daerah juga menjadi masalah besar. Di beberapa daerah, pengajaran pendidikan kewarganegaraan masih kurang mendalam dan belum sepenuhnya mampu membentuk karakter siswa yang memiliki kesadaran hukum. Banyaknya beban kurikulum yang harus diselesaikan dalam waktu terbatas membuat materi pendidikan kewarganegaraan sering hanya diberikan secara terburu-buru dan tanpa penguatan yang cukup. Ini menyebabkan siswa hanya mendapatkan pemahaman dasar yang minim, dan kesadaran hukum yang seharusnya mereka miliki menjadi kurang berkembang (Amnå, 2012).

Mengamati peran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum adalah suatu hal yang sangat penting, mengingat kedisiplinan dan kepatuhan terhadap hukum merupakan fondasi bagi terciptanya tatanan sosial yang stabil. Pembelajaran yang efektif di pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan individu-individu yang lebih bertanggung jawab dan sadar akan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam lingkup hukum maupun sosial. Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih dalam bagaimana pendidikan ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan diterapkan secara lebih efisien agar dapat memberi dampak positif yang lebih besar bagi perubahan perilaku masyarakat (Fajar *et al.*, 2021).

Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendidikan kewarganegaraan yang diterima siswa di sekolah-sekolah dapat berkontribusi terhadap pembentukan perilaku masyarakat yang lebih taat hukum. Kajian ini mengulas cara-cara pendidikan kewarganegaraan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum di kehidupan sehari-hari siswa, serta bagaimana pengajaran dapat mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat pada umumnya.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis peran pendidikan kewarganegaraan untuk membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Studi literatur dipilih sebagai metode utama karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menggali pemahaman yang telah ada sebelumnya dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, jurnal, artikel, serta laporan penelitian terkait dengan topik pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran hukum. Melalui studi literatur, peneliti dapat mengumpulkan berbagai perspektif tentang bagaimana pendidikan kewarganegaraan dapat mempengaruhi pembentukan perilaku hukum di masyarakat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Creswell (2014), studi literatur memungkinkan peneliti untuk menyusun dan mengintegrasikan temuan-temuan yang ada serta mengidentifikasi kesenjangan penelitian yang masih perlu diperhatikan.

Pendekatan studi literatur juga memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi berbagai teori yang mendasari pendidikan kewarganegaraan serta kaitannya dengan pembentukan karakter masyarakat yang taat hukum. Dengan menganalisis berbagai hasil penelitian yang sudah ada, peneliti dapat menyusun pemahaman yang lebih komprehensif tentang efektivitas pendidikan kewarganegaraan untuk meningkatkan kesadaran hukum. Penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh positif antara pendidikan kewarganegaraan dengan peningkatan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, meskipun ada berbagai faktor yang memengaruhi hasilnya, seperti kualitas pengajaran dan implementasi kurikulum. Studi literatur juga dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah, serta memberi wawasan untuk penelitian lebih lanjut mengenai penguatan pendidikan hukum di tingkat sekolah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah berperan penting untuk membentuk perilaku warga negara yang taat hukum. Pendidikan ini memberikan landasan yang kuat untuk membentuk pemahaman siswa tentang hak dan kewajiban mereka sebagai bagian dari masyarakat. Dengan memahami apa yang diharapkan dari mereka sebagai warga negara, siswa dapat belajar untuk lebih menghargai hukum sebagai bagian dari tatanan sosial yang stabil dan adil. Salah satu tujuan utama pendidikan kewarganegaraan adalah membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda, yang kemudian diharapkan dapat ditularkan ke masyarakat luas.

Melalui pendidikan kewarganegaraan, siswa memperoleh pemahaman tentang dasar-dasar hukum yang mengatur kehidupan mereka dan masyarakat secara umum. Pendidikan ini memberikan pengetahuan mengenai berbagai peraturan yang berlaku, serta menjelaskan mengapa hukum itu penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Dengan memahami struktur hukum dan fungsinya, siswa dapat menyadari bahwa hukum adalah kumpulan aturan yang harus diikuti, dan merupakan fondasi yang mendukung kehidupan sosial yang harmonis. Pembelajaran ini mencakup berbagai aspek, mulai dari hak dan kewajiban sebagai warga negara, hingga mekanisme penegakan hukum dan peran lembaga-lembaga negara untuk menjaga keadilan.

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga mengajarkan nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nilai-nilai ini sangat penting untuk membentuk individu yang taat hukum dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Misalnya, dengan menanamkan nilai kejujuran, siswa diajarkan untuk menghargai integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan mereka, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tanggung jawab mengajarkan mereka untuk menyadari konsekuensi dari tindakan mereka dan pentingnya berperilaku sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku (Carretero *et al.*, 2015). Disiplin, di sisi lain, membantu siswa memahami pentingnya mengikuti aturan dan prosedur yang ada, yang merupakan bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan cara ini, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk mengajarkan teori tentang hukum, dan untuk membentuk karakter dan perilaku siswa agar lebih menghargai dan mematuhi hukum. Proses pembelajaran yang melibatkan diskusi, simulasi, dan studi kasus dapat memberikan pengalaman praktis yang memperkuat pemahaman siswa tentang hukum dan kewarganegaraan. Misalnya, melalui simulasi sidang atau debat mengenai isu-isu hukum terkini, siswa dapat belajar untuk berpikir kritis dan menganalisis berbagai sudut pandang, yang kemudian dapat meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu-isu sosial dan hukum yang relevan. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berperan penting untuk menciptakan generasi yang memahami hukum, dan memiliki karakter yang kuat dan komitmen untuk menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara (Manning & Edwards, 2014). Melalui pendidikan ini, diharapkan siswa dapat tumbuh menjadi individu yang aktif, bertanggung jawab, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat, serta mampu menghargai dan mematuhi hukum sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari mereka (Evendi *et al.*, 2021).

Namun, untuk dapat mempengaruhi perilaku masyarakat secara signifikan, pendidikan kewarganegaraan harus dilaksanakan dengan cara yang efektif dan relevan. Mengajarkan hukum pada materi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah kunci utama agar siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Pembelajaran yang terlalu teoritis dan tidak menghubungkan materi dengan contoh-contoh konkret kehidupan nyata sering membuat siswa tidak sepenuhnya memahami betapa pentingnya mematuhi hukum dalam situasi yang berbeda. Oleh karena itu, pengajaran yang berbasis pada kasus nyata atau simulasi hukum dapat membantu siswa untuk melihat langsung bagaimana hukum berperan dalam kehidupan mereka (Amnã, 2012).

Salah satu pendekatan yang bisa diterapkan adalah dengan mengintegrasikan situasi hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari siswa ke dalam materi ajar. Misalnya, melalui diskusi kasus pelanggaran lalu lintas, penipuan, atau pelanggaran kecil lainnya yang sering terjadi di sekitar mereka, siswa bisa lebih memahami konsekuensi hukum dari tindakan yang mereka ambil. Pembelajaran yang kontekstual ini membuat siswa lebih mudah memahami materi, dan memotivasi mereka untuk menghindari pelanggaran hukum, karena mereka melihat dampak negatif dari tindakan tersebut (Campbell, 2019).

Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa solidaritas dan empati di antara siswa. Saat siswa memahami bahwa hukum ada untuk melindungi hak-hak orang lain, mereka menjadi lebih sadar akan dampak perilaku mereka terhadap orang lain (Rogers, 2017). Hal ini akan mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka secara pribadi maupun sosial. Dengan membangun sikap empati terhadap sesama, pendidikan kewarganegaraan dapat mengubah cara pandang siswa terhadap peraturan yang ada dan membantu mereka untuk lebih taat hukum (Carretero *et al.*, 2015).

Namun, untuk memastikan pendidikan kewarganegaraan dapat membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum, sangat penting bagi guru untuk menjadi teladan yang baik. Peran guru untuk memberikan contoh perilaku yang sesuai dengan hukum sangatlah penting. Jika guru menunjukkan sikap disiplin dan taat hukum, siswa akan cenderung meniru perilaku tersebut. Ini sesuai dengan teori pembelajaran sosial yang menekankan pentingnya model untuk membentuk perilaku individu. Ketika siswa melihat bahwa tindakan yang sesuai dengan hukum dihargai dan diikuti oleh guru mereka, mereka lebih mungkin untuk mengikuti contoh tersebut dalam kehidupan mereka.

Pendidikan kewarganegaraan yang mengandung nilai-nilai hukum diajarkan dalam bentuk mata pelajaran tertentu, dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Misalnya, sekolah dapat menerapkan peraturan yang jelas dan konsisten mengenai disiplin, dan memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum atau aturan diikuti dengan tindakan yang sesuai (Saputra *et al.*, 2022). Dengan cara ini, siswa mempelajari hukum secara teori, dan melihat penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Namun, ada juga tantangan untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan yang efektif. Salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan kewarganegaraan adalah pandangan bahwa mata pelajaran ini sering dianggap kurang penting dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, seperti matematika, sains, atau bahasa. Persepsi ini dapat berakar dari fokus yang lebih besar pada hasil akademis yang terukur, seperti nilai ujian, yang sering tidak mencakup aspek-aspek pendidikan kewarganegaraan. Akibatnya, pengajaran pendidikan kewarganegaraan sering dilakukan secara terburu-buru atau dengan alokasi waktu yang minim dalam kurikulum. Ketika waktu yang tersedia untuk mengajarkan pendidikan kewarganegaraan terbatas, guru mungkin merasa terpaksa untuk menyampaikan materi dengan cepat, tanpa memberikan kesempatan bagi siswa untuk merenungkan dan mendiskusikan konsep-konsep yang lebih kompleks terkait dengan hukum, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara (Reimers *et al.*, 2014). Kondisi ini berpotensi mengakibatkan siswa tidak mendapatkan pemahaman tentang pentingnya hukum dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tanpa pemahaman yang kuat tentang hukum dan kewarganegaraan, siswa mungkin tidak menyadari bagaimana hukum memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari hak-hak individu hingga tanggung jawab sosial. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakpedulian terhadap isu-isu hukum dan sosial yang penting, serta mengurangi partisipasi mereka dalam proses demokrasi (Manning & Edwards, 2014). Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hukum dapat membuat siswa lebih rentan terhadap pelanggaran hukum, karena mereka tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan penekanan pada pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum, dengan memberikan alokasi waktu yang memadai dan pendekatan pengajaran yang lebih baik. Dengan cara ini, siswa dapat dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab, serta memahami peran hukum untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab (Blasko *et al.*, 2018). Penting bagi sekolah dan pemerintah untuk memberikan perhatian lebih pada pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang relevan.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah bahwa banyak siswa saat ini mungkin sudah terbiasa dengan pelanggaran hukum kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti tidak mematuhi aturan lalu lintas atau peraturan sekolah (Campbell, 2019). Kebiasaan ini sering dianggap sepele dan tidak berbahaya sehingga siswa cenderung mengabaikan konsekuensi yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Misalnya, ketika siswa melanggar aturan lalu lintas, seperti tidak menggunakan helm saat bersepeda atau melanggar lampu merah, mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan tersebut berisiko bagi keselamatan diri mereka sendiri, dan dapat membahayakan orang lain. Selain itu, pelanggaran peraturan sekolah, seperti datang terlambat atau tidak mengikuti tata tertib, dapat menciptakan budaya ketidakpatuhan yang lebih luas di kalangan siswa (Al Hakim *et al.*, 2021). Ketika pelanggaran ini dianggap sebagai hal yang biasa, siswa dapat mengembangkan pandangan bahwa hukum dan peraturan tidak perlu dipatuhi, yang selanjutnya dapat menghambat pemahaman mereka

tentang pentingnya mematuhi hukum dalam lingkup yang lebih luas. Kebiasaan ini dapat menjadi hambatan serius untuk membentuk karakter dan sikap siswa terhadap hukum. Jika siswa tidak diajarkan untuk menghargai dan memahami hukum sejak dini, mereka mungkin akan tumbuh menjadi individu yang kurang peduli terhadap norma dan aturan yang ada di masyarakat. Hal ini dapat berkontribusi pada perilaku anti-sosial dan pelanggaran hukum yang lebih serius di kemudian hari (Negara *et al.*, 2022). Oleh karena itu, penting bagi pendidik dan orang tua untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang konsekuensi dari pelanggaran hukum, serta menekankan nilai-nilai kepatuhan dan tanggung jawab. Dengan cara ini, siswa dapat belajar untuk menghargai hukum sebagai bagian integral dari kehidupan bermasyarakat, yang melindungi individu dan menciptakan lingkungan yang aman dan tertib bagi semua. Pendidikan kewarganegaraan harus lebih dari sekadar memberikan pengetahuan, dan membangun kebiasaan dan sikap yang mendukung kepatuhan terhadap hukum (Komalasari & Saripudin, 2018).

Peran orang tua juga sangat penting untuk membentuk perilaku anak yang taat hukum. Jika orang tua mengajarkan dan menegakkan nilai-nilai hukum di rumah, anak-anak akan lebih mudah memahami pentingnya menghormati hukum di sekolah dan di masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan harus melibatkan kolaborasi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar dapat membentuk generasi muda yang memahami hukum, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan di sekolah memegang peranan krusial untuk membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum. Sebagai salah satu bidang studi yang fundamental, pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara, dan berperan sentral untuk membentuk karakter dan sikap siswa terhadap hukum. Dengan pembelajaran yang relevan dan berbasis pada perspektif sosial yang ada, siswa diharapkan memahami teori-teori hukum dan mampu melihat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini memungkinkan mereka untuk menghargai hukum sebagai elemen dasar yang menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Morris *et al.*, 2013). Agar pendidikan kewarganegaraan efektif untuk membentuk perilaku yang taat hukum, pendekatan yang digunakan harus bersifat integratif, menggabungkan teori dengan praktik. Misalnya, pembelajaran berbasis kasus yang menghubungkan materi dengan situasi nyata yang terjadi di sekitar siswa, seperti pelanggaran hukum yang sering mereka jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara ini, siswa bisa lebih mudah menginternalisasi nilai-nilai hukum dan memahami dampak yang ditimbulkan dari setiap tindakan yang mereka ambil. Sehingga, pendidikan kewarganegaraan memberikan pengetahuan, dan membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya mematuhi hukum.

Meskipun pendidikan kewarganegaraan memiliki potensi besar untuk membentuk individu yang taat hukum, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya perhatian terhadap kualitas pengajaran yang diberikan. Banyak sekolah yang masih menganggap pendidikan kewarganegaraan sebagai mata pelajaran tambahan yang tidak terlalu mendapat perhatian serius dalam hal kurikulum

dan metode pengajaran. Padahal, kurikulum pendidikan kewarganegaraan yang kurang relevan dengan dinamika sosial terkini dapat membuat siswa kehilangan kaitan antara teori yang diajarkan dan realitas kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif guru sebagai fasilitator yang mengajarkan teori dan menanamkan nilai-nilai hukum dalam kehidupan siswa. Guru harus menjadi contoh yang dapat ditiru oleh siswa untuk mematuhi aturan dan hukum yang berlaku, karena pendidikan kewarganegaraan juga melibatkan aspek pengajaran melalui teladan. Selain itu, peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting untuk mendukung pendidikan ini. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan lingkungan masyarakat akan menciptakan suatu ekosistem yang mendukung pembentukan perilaku yang taat hukum. Pendidikan kewarganegaraan terbatas pada ruang kelas, tetapi harus melibatkan pengalaman langsung dan contoh nyata dalam kehidupan sosial siswa. Dengan demikian, jika pendidikan kewarganegaraan dapat diimplementasikan secara efektif dengan dukungan yang tepat dari berbagai pihak, ia akan mampu menghasilkan generasi muda yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan pada akhirnya, lebih taat terhadap hukum, yang akan berdampak positif bagi pembangunan masyarakat yang lebih tertib dan beradab.

## **PENUTUP**

Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan di sekolah memiliki potensi besar untuk membentuk perilaku masyarakat yang lebih taat hukum. Melalui pemahaman yang diberikan mengenai hak, kewajiban, dan hukum, siswa dapat menginternalisasi nilai-nilai yang mendasari peraturan di masyarakat. Dengan metode pengajaran yang relevan, seperti pembelajaran berbasis kasus dan penerapan contoh nyata, siswa dapat lebih mudah memahami bagaimana hukum berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Penguatan pendidikan kewarganegaraan berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan, dan sebagai alat untuk membentuk karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab siswa sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Selain itu, dukungan dari lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemahaman mengenai pentingnya hukum dalam tatanan sosial.

Saran yang dapat diberikan adalah pentingnya untuk meningkatkan perhatian dan kualitas pendidikan kewarganegaraan di sekolah-sekolah dengan memperbarui kurikulum yang ada, serta mengintegrasikan nilai-nilai hukum dalam setiap aspek kehidupan sekolah. Untuk memastikan keberhasilan pendidikan ini, guru perlu diberikan pelatihan tentang cara mengajarkan nilai-nilai kewarganegaraan secara efektif dan menjadi contoh yang baik bagi siswa. Selain itu, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa nilai-nilai hukum yang diajarkan di sekolah dapat diterapkan dengan baik di kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan dapat mencapai tujuannya untuk membentuk masyarakat yang lebih taat hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al Hakim, J. A. Rojak, & B. Triono. (2021). Transformation of Cultural Values and Social Practices in the Digital Age, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 173 – 176.
- Amnå, E. (2012). How is civic engagement developed over time? Emerging answers from a multidisciplinary field. *Journal of adolescence*, 35(3), 611-627.
- Blasko, Z. S., da Costa, P., & Vera-Toscano, E. (2018). Civic attitudes and behavioural intentions in the 2016 International Civic and Citizenship Education Study (ICCS): New evidence for education and training policies in Europe, 26. Publications Office of the European Union: Luxembourg. doi, 10, 218931.
- Campbell, D. E. (2019). What social scientists have learned about civic education: A review of the literature. *Peabody Journal of Education*, 94(1), 32-47.
- Carretero, M., Haste, H., & Bermudez, A. (2015). Civic education. In *Handbook of educational psychology* (pp. 309-322). Routledge.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Evendi, W., M. Mujito, & M. S. F. Yulianis. (2021). Peer Friendship and the Establishment of Children's Behavior in Family Life, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 141 – 146.
- Fajar, A.S.M., M. Zakki, D. Darmawan, W. Evendi, & Mujito. (2021). A Socio-Psychological Analysis of Adolescents' Choice of Ideals in an Environment of Social Pressure, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 251 – 256.
- Hardyansah, R., D. Darmawan, H. Udjari, & N. H. Pakpahan. (2022). Managing Prosperity through a Minimalist Lifestyle: Social and Economic Implications, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 163 – 168.
- Komalasari, K., & Saripudin, D. (2018). The Influence of Living Values Education-Based Civic Education Textbook on Students' Character Formation. *International Journal of Instruction*, 11(1), 395-410.
- Kurniawan, Y., & D. Darmawan. (2021). The Adaptive Learning Effect on Individual and Collecting Learning, *Journal of Social Science Studies* 1(1), 93 – 98.
- Kurniawan, Y., J. A. Rojak, D. Darmawan, & A. S. M. Fajar. (2021). Exploration of Literary Works as Media to Form and Maintain National Identity through Narratives and Cultural Symbols, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 187 – 192.
- Lestari, U. P., Ernawati, E. A. Sinambela, N. Masithoh, & E. C. Gautama. (2022). Examination of Tax Compliance through Civic Mobilization and Participatory Fiscal Governance in Modern Societies, *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 217 – 222.
- Manning, N., & Edwards, K. (2014). Does civic education for young people increase political participation? A systematic review. *Educational review*, 66(1), 22-45.

- Mardikaningsih, R. (2021). Urbanization and Social Inequality: Challenges in Building Social Cohesion in a City-Based Environment, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 135 – 140.
- Masnawati, E. & D. Darmawan. (2022). School Organization Effectiveness: Educational Leadership Strategies in Resource Management and Teacher Performance Evaluation, *International Journal of Service Science, Management, Engineering, and Technology*, 2(1), 43–51.
- Morris, P., Cogan, J. J., & Liu, M. (2013). A comparative overview: Civic education across the six societies. *Civic Education in the Asia-Pacific Region*, 167-189.
- Negara, D. S., D. Darmawan, & P. Saktiawan. (2022). Privacy Violations on Social Media and Interpersonal Trust Among Young Generations, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 151 – 156.
- Pakpahan, N. H., P. Saktiawan., & R. Hardyansah. (2021). Inter-Agency Coordination Strategy in Improving Security through Social Intervention, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 159 – 162.
- Pakpahan, N. H., D. Darmawan, & J. A. Rojak. (2022). Racial Discrimination and How Psychological Wellbeing and Social Engagement Impacts: A Review of the Literature on Identity, Stigma, and Coping Strategies in Multicultural Societies, *Journal of Social Science Studies*, 2(1), 87 – 94.
- Pangalila, T., Tuerah, J., & Umar, M. (2020). Character formation through civic education learning process.
- Reimers, F. M., Ortega, M. E., Cardenas, M., Estrada, A., & Garza, E. (2014). Empowering Teaching for Participatory Citizenship: Evaluating the Impact of Alternative Civic Education Pedagogies on Civic Attitudes, Knowledge and Skills of Eight-Grade Students in Mexico. *Journal of Social Science Education*, 13(4), 41-55.
- Rogers, M. T. (2017). The history of civic education in political science: The story of a discipline's failure to lead. *Teaching civic engagement across the disciplines*, 73.
- Rojak, J. A. (2021). The Importance of Civic Education to Increase Community Legal Awareness, *Journal of Social Science Studies*, 1(1), 44 – 50.
- Saktiawan, P., R. Hardyansah, D. Darmawan, & A. R. Putra. (2021). Ethical Principles in Indonesian Legal Advocacy: Sustaining Justice in Adversarial Systems Through Professional Integrity, *Journal of Social Science Studies*, 1(2), 239 – 244.
- Saputra, R., N. H. Pakpahan, R. Hardyansah, D. Darmawan, & F. Dirgantara. (2022). Comparison of Mediation and Litigation in Dispute Resolution: The Impact of Culture on Fairness and Acceptability of Outcomes in Multicultural Societies, *Journal of Social Science Studies*, 2(2), 107 – 114.
- Valeeva, R. A., Koroleva, N. E., & Sakhapova, F. K. (2015). Civic education of the technical university students in foreign language classes. *Rev. Eur. Stud.*, 7, 176.